

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan suatu fenomena sosial, ekonomi dan budaya yang melibatkan perpindahan sementara individu atau kelompok dari tempat tinggalnya menuju suatu destinasi dengan tujuan utama untuk rekreasi, relaksasi, eksplorasi maupun kepentingan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan wisata yang didukung oleh beragam layanan serta fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha yang mencerminkan transformasi kebutuhan manusia akan pengalaman interaksi sosial lintas budaya, dan pencapaian nilai-nilai personal.

Sektor pariwisata memiliki peran yang luas dan terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan. Aktivitas di sektor tersebut memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu menggerakkan berbagai sektor turunan seperti perhotelan, UMKM, ekonomi kreatif dan infrastruktur serta menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan (Athallah et al., 2024). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menekankan bahwa arah pengembangan nasional saat ini difokuskan pada penguatan keterpaduan antar sektor, khususnya melalui program “pariwisata berbasis komunitas dan digitalisasi destinasi” sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola berkelanjutan.

Dampak pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan devisa negara juga tergolong signifikan yang menjadikannya

sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Peran strategisnya juga tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pendapatan dari pajak hotel, restoran dan hiburan serta dalam perluasan kesempatan kerja dan investasi lokal. Selain itu, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, turut mendorong geliat ekonomi di sekitar kawasan tujuan melalui berbagai aktivitas penunjang seperti akomodasi, transportasi, kuliner dan kerajinan.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terjadi lonjakan kunjungan sebesar 98,33% pada periode 2022-2023 yang menandai fase awal pemulihan sektor pariwisata nasional. Tren positif tersebut berlanjut pada periode berikutnya dengan pertumbuhan sebesar 8,38% pada tahun 2023-2024 serta kembali meningkat 10,45% pada tahun 2024-2025. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut tidak hanya mencerminkan pemulihan pasca krisis pandemi tetapi juga mengindikasikan adanya pergeseran preferensi wisatawan global terhadap destinasi yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, keaslian budaya serta pengalaman wisata berbasis lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

**Tabel 1. 1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara</b>
--------------	---

2022	5.889.031
2023	11.680.000
2024	12.658.048
2025	13.980.000

*Sumber : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2025*

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan ekonomi, Pelestarian sosial-budaya serta perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata menjadi salah satu strategi negara untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (Iqbal, 2022). Keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang terintegrasi dan dapat diukur melalui indikator seperti jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi devisa yang dihasilkan bagi negara serta melalui efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pariwisata di Indonesia menerapkan pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, menekankan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal (Idrus et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan tata kelola lintas sektor sebagai elemen strategis karena pengembangan destinasi wisata melibatkan beragam aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini

diperlukan mekanisme koordinasi dan kerja sama yang mampu menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam satu kerangka pengelolaan yang terintegrasi.

Sejalan dengan kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menekankan pentingnya tata kelola lintas sektor tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerjemahkannya ke dalam berbagai kebijakan konkret, salah satunya melalui pengembangan desa wisata sebagai strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Regulasi formal yang menjadi dasar pembentukan desa wisata tertuang dalam beberapa perangkat kebijakan, salah satunya adalah UU Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa dana desa dapat digunakan untuk pengembangan potensi desa wisata, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung, pelatihan SDM dan promosi digital. Pembentukan desa wisata juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Desa Wisata yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam mendesain dan mengelola destinasi berbasis komunitas. Beberapa Regulasi menunjukkan

bahwa pengembangan desa wisata pada dasarnya menuntut model tata kelola yang bersifat kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas antar aktor dan proses pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang memiliki daya tarik khas sebagai destinasi wisata di mana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi, budaya serta kegiatan agraris seperti bertani dan berkebun yang menjadi bagian dari pengalaman wisata. Keaslian lingkungan dan kelestarian alam juga menjadi elemen penting dalam keberadaan desa wisata. Desa Wisata berfungsi sebagai laboratorium hidup di mana keunikan budaya, adat istiadat serta kekayaan alam dirajut menjadi produk wisata yang autentik dan berdaya saing (Putra & Linda, 2022).

Desa wisata saat ini tidak hanya menawarkan atraksi alam dan budaya, tetapi juga pengalaman berbasis edukasi, teknologi dan interaksi sosial yang intensif. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap aspek keberlanjutan, konsep desa wisata modern menuntut integrasi nilai-nilai lokal dengan inovasi pelayanan wisata (Sahidin et al., 2024). Penggunaan teknologi informasi seperti media sosial dan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi instrumen penting dalam mempromosikan dan mengelola destinasi secara lebih efektif (Sahidin et al., 2024). Hal ini menjadi dasar lahirnya konsep *Smart Tourism Village*, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan visibilitas global.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang indah karena adanya Gunung Ciremai yang leataknya di antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sehingga memiliki potensi alam yang cukup tinggi dan kekayaan budaya yang masih lestari. Letaknya yang strategis di tengah jalur penghubung antar kabupaten dan kota besar, keberadaan Bandara Internasional Kertajati yang diresmikan pada tahun 2018 menjadi wadah bagi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi pariwisata di Kabupaten Majalengka sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan komitmennya dalam pengembangan pariwisata lokal melalui sejumlah regulasi, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Untuk menggambarkan dinamika perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka, Data berikut menunjukkan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Majalengka dalam beberapa periode. Data ini digunakan untuk menggambarkan posisi Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan sektor pariwisata di tingkat regional. Data dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mencerminkan tren pertumbuhan dan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut, baik dari sisi kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Majalengka mencapai

1.050.524 orang pada tahun 2023, meningkat tajam dari 472.906 orang di tahun 2021 dan 818.547 orang pada 2022.

**Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Majalengka**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Manca Negara</b>	<b>Wisatawan Nusantara</b>	<b>Jumlah</b>
2017	-	200.226	200.226
2018	-	23.260	23.260
2019	1.548	699.787	701.335
2021	-	472.906	472.906
2022	4	818.543	818.547
2023	19	1.050.505	1.050.542

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023.

Peningkatan kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki peluang besar dalam pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Jenis wisata di Majalengka sangat beragam, mulai dari wisata alam seperti terasering, curug (air terjun), gunung dan situ; wisata buatan seperti taman air, waterboom dan coffeeshop hingga wisata budaya yang mencakup situs makam leluhur, kesenian tradisional dan pasar adat. Keberagaman ini menjadikan Majalengka tidak hanya sebagai tempat berlibur, tetapi juga sebagai ruang edukasi budaya dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Kabupaten Majalengka yaitu pembentukan Desa Wisata.

Pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Majalengka melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Regulasi

ini menjadi dasar dalam merancang pembangunan pariwisata yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, mengembangkan produk wisata berkualitas serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kawasan desa wisata melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Dan Penyelenggaraan Desa Wisata dan memperkuat kebijakan tersebut dengan SK Bupati Kabupaten Majalengka mengenai penetapan Desa Wisata di Kabupaten Majalengka yang menetapkan 33 desa di Kabupaten sebagai desa wisata.

Salah satu desa wisata yang memiliki potensi keindahan alam dan kekayaan budaya lokal adalah Desa Wisata Bantaragung yang terletak di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Berada di kaki Gunung Ciremai, Desa Bantaragung memiliki daya tarik pariwisata berbasis alam yang dipadukan dengan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Didukung oleh regulasi daerah serta infrastruktur yang mulai berkembang, desa ini dinilai layak dikembangkan sebagai desa wisata dan memenuhi kriteria destinasi wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan serta berdaya saing dalam kerangka pembangunan pariwisata nasional. Desa Wisata Bantaragung memiliki beragam potensi wisata unggulan yang meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata edukasi yang dikelola melalui kolaborasi antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta masyarakat lokal. Berbagai destinasi dan program wisata seperti Curug Cipeuteuy, Pasar Bumi Pakuwon serta eduwisata pertanian dan

lingkungan menjadi daya tarik utama yang memperkuat posisi Desa Wisata Bantaragung sebagai destinasi wisata berbasis komunitas.

Perkembangan Desa Wisata Bantaragung ditandai juga oleh pergeseran pendekatan pariwisata yang sebelumnya konvensional, kini semakin digital dan modern. Sejak 2018, desa ini mulai memperkenalkan akun media sosial sebagai sarana promosi. Pada tahun 2022, Desa bantaragung membuat Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di alamat [bantaragung.desa.id](http://bantaragung.desa.id), hasil inisiasi Karang Taruna dan pendanaan dari Dana Desa. Langkah ini terbukti efektif karena pada 2023, Desa Bantaragung berhasil meraih juara 2 dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada kategori Digital dan Konten Kreatif. Ini menjadi bukti bahwa integrasi teknologi informasi bukan hanya meningkatkan visibilitas, tetapi juga memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata digital.

Kolaborasi menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan pembangunan wisata sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat. Kolaborasi yang efektif sebagaimana ditegaskan oleh Emerson dan Nabatchi (Dyah & Prasajo, 2020), harus dibangun atas dasar kepercayaan, komitmen bersama dan komunikasi intensif melalui proses deliberatif antar pemangku kepentingan. Pentingnya pendekatan kolaboratif ini semakin terlihat ketika kita mengamati kondisi aktual Desa Wisata Bantaragung. Untuk memperoleh gambaran konkret mengenai tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Bantaragung, berikut adalah data

kunjungan berdasarkan bulan, jumlah pengunjung, asal institusi, lama tinggal dan jenis kegiatan wisata perlu disajikan secara sistematis. Data berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Bantaragung pada tahun 2024.

**Tabel 1. 3 Data Kunjungan Desa Wisata Bantaragung, Tahun 2024**

No.	Bulan	Banyaknya	Asal	Lama Tinggal	Keterangan
1.	Januari	55 orang	SMP Plus Islamic Village	5 Hari	Paket Edukasi
2.	Maret	3 orang	Increase	1 hari	FGD Climate Skill
3.	Juni	48 Orang	Universitas Pancasila	2 hari	Trip Observasi
		35 orang	BKSDA Kawah Kamojang	3 hari	Study Banding
4.	September	15 orang	Open Trip	1 hari	Paket Ulin di sawah
5.	Oktober	15 orang	Open Trip	1 hari	Paket Trekking
		30 orang	Bank BTN	1 Hari	Paket Trekking
		500 orang	BI, Dinas, Media, Dll.	1 Hari	Festival Bumi Bantaragung

*Sumber : Laporan data kunjungan Desa Wisata Bantaragung, Tahun 2024.*

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya variasi jumlah kunjungan wisatawan antar bulan yang cukup signifikan. Pola kunjungan menunjukkan fluktuasi yang tajam, dengan jumlah kunjungan yang tinggi pada waktu-waktu tertentu, sementara pada beberapa bulan lainnya hampir tidak terdapat kunjungan wisatawan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa arus kunjungan wisata ke Desa Wisata Bantaragung belum berjalan secara stabil sepanjang tahun.

Selain data kunjungan desa secara umum, Dinamika peningkatan jumlah wisatawan di Desa Wisata Bantaragung juga tercermin secara nyata melalui pengembangan wisata berbasis event. Salah satu kegiatan unggulan yang menjadi representasi model tersebut adalah Pasar Bumi Pakuwon, sebuah agenda wisata tematik yang diselenggarakan secara berkala dan dirancang untuk menampilkan potensi lokal desa, baik dari aspek budaya, ekonomi kreatif, maupun kearifan lokal. Keberadaan kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi destinasi, tetapi juga sebagai magnet utama yang mampu menarik wisatawan dari berbagai wilayah. Penyajian data berikut dimaksudkan untuk menggambarkan intensitas penyelenggaraan event, tingkat kunjungan wisatawan, serta cakupan daerah asal pengunjung sebagai indikator penting dalam menilai peran wisata berbasis event terhadap pola kunjungan di Desa Wisata Bantaragung.

**Tabel 1. 4 Data Kunjungan Pasar Bumi Pakuwon**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kunjungan</b>	<b>Rata-Rata/Event</b>	<b>Jumlah Daerah Asal</b>	<b>Keterangan</b>
2024	3	2.365	788	Awal pelaksanaan event.
2025	11	12.129	1.103	Peningkatan signifikan & jangkauan luas.

*Sumber : Pokdarwis Desa Bantaragung, 2025.*

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya peningkatan yang signifikan baik dari sisi frekuensi penyelenggaraan kegiatan maupun jumlah kunjungan wisatawan pada Pasar Bumi Pakuwon. Pada tahun 2024, event ini masih berada

pada tahap awal pelaksanaan dengan jumlah kegiatan yang terbatas. namun, pada tahun 2025 terjadi lonjakan frekuensi event yang diikuti oleh peningkatan total kunjungan dan perluasan daerah asal wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata Desa Wisata Bantaragung masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan kegiatan berbasis event tertentu, dimana peningkatan kunjungan cenderung bersifat temporer dan mengikuti jadwal pelaksanaan acara. Pasar Bumi Pakuwon berperan strategis sebagai penggerak utama arus wisatawan, namun pada saat yang sama mengindikasikan bahwa kunjungan wisata di luar momentum event masih belum berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Selain terpusat pada wisata berbasis event, pola kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Bantaragung juga menunjukkan karakteristik lain, yaitu dominan bersifat terorganisir melalui paket wisata yang berasal dari institusi pendidikan maupun organisasi tertentu. Kunjungan jenis ini umumnya difasilitasi langsung oleh pengelola desa wisata dan dirancang dalam bentuk program edukatif, pengalaman budaya, maupun kegiatan tematik sesuai kebutuhan institusi. Penyajian data berikut bertujuan untuk memperlihatkan karakteristik kunjungan wisata berbasis paket, sekaligus menggambarkan kecenderungan segmentasi wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Bantaragung.

**Tabel 1. 5 Kunjungan Data Paket Wisata**

<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>	<b>Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
29 Oktober 2025	250	NASSA SCHOOL	Bekasi	<i>Service and Education Trip</i>
13-16 November 2025	204	SMA Mardi Yuana	Depok	<i>Live in History</i>

*Sumber : Pokdarwis Desa Bantaragung, 2025.*

Data kunjungan paket wisata menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Bantaragung berasal dari institusi pendidikan dengan jumlah peserta yang relatif besar dan waktu kunjungan yang telah direncanakan sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa aktivitas wisata di desa tersebut masih sangat bergantung pada kunjungan kolektif yang terjadwal, bukan pada kunjungan individu atau wisatawan umum yang datang secara mandiri. Kondisi tersebut memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengembangan pariwisata Desa Wisata Bantaragung masih berfokus pada model wisata terprogram, baik melalui event maupun paket institusional, sehingga keberlanjutan kunjungan wisata di luar skema tersebut masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam strategi pengembangan desa wisata.

Kondisi tersebut belum sejalan dengan prinsip pengembangan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021, yang menekankan asas manfaat, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Ketergantungan terhadap kegiatan berbasis event dan kunjungan wisata institusional yang difasilitasi oleh lembaga

pengelola menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata desa yang akan berdampak pada keberlanjutan pariwisata dari aspek sosial dan ekonomi masih bersifat rentan karena kepemilikan kolektif yang bersumber dari inisiatif warga belum tumbuh secara kuat. Kondisi ini juga berdampak pada distribusi manfaat yang belum merata, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan individu yang belum terakomodasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi pariwisata.

Selain persoalan pola kunjungan wisata, Desa Wisata Bantaragung juga menghadapi permasalahan partisipasi masyarakat yang bersifat struktural. Pelaksanaan kegiatan pariwisata masih didominasi oleh peran kelembagaan formal seperti Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa, sementara keterlibatan masyarakat cenderung terbatas sebagai pelaksana kegiatan. Temuan lapangan menunjukkan belum adanya strategi yang terencana untuk mendorong inisiatif masyarakat secara berkelanjutan, adanya perbedaan persepsi antar pelaku usaha lokal yang memicu kecemburuan, serta rendahnya minat sebagian warga untuk terlibat meskipun telah dilakukan sosialisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat belum berjalan secara optimal.

Dalam praktiknya, hubungan antar pemangku kepentingan di Desa Wisata Bantaragung menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama yang relatif baik namun kolaborasi yang terbangun masih cenderung bersifat administratif dan operasional, serta belum sepenuhnya membuka ruang musyawarah yang inklusif bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan

pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga gagasan dan inisiatif yang berasal dari warga belum berkembang secara optimal. Kondisi ini berpotensi mempertahankan pola pengelolaan yang berpusat pada lembaga formal dan kurang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat desa.

Desa Wisata Bantaragung mencerminkan dinamika antara adanya kemauan partisipatif masyarakat dan lemahnya ekosistem yang mampu mendorong tumbuhnya inisiatif warga dalam pengembangan pariwisata. Meskipun hubungan antar pemangku kepentingan seperti Pokdarwis, BUMDes, pemerintah desa dan forum musyawarah desa menunjukkan koordinasi yang relatif harmonis, partisipasi masyarakat masih cenderung terbatas pada peran pelaksana kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan secara formal belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme yang mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif sebagai penggagas dan pengambil peran utama dalam pengelolaan pariwisata desa.

Keberlanjutan pariwisata pedesaan pada dasarnya mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari identifikasi potensi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Tanpa keterlibatan tersebut, pembangunan pariwisata berisiko berkembang menjadi kegiatan yang bersifat elitis dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kondisi ini tercermin dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Bantaragung, dimana ketergantungan terhadap event dan wisata institusional masih cukup tinggi, sementara inisiatif masyarakat secara mandiri

belum berkembang secara merata. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya distribusi manfaat serta rapuhnya keberlanjutan sosial dan ekonomi pariwisata desa.

Tantangan dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, keterbatasan ruang partisipasi serta rendahnya inisiatif masyarakat, menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, kerangka *Collaborative Governance* menjadi relevan untuk dikaji karena menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengambilan keputusan publik. Meskipun berbagai kebijakan daerah telah menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata, implementasinya di tingkat desa belum sepenuhnya menunjukkan praktik *Collaborative Governance* yang substantif.

Kolaborasi yang berjalan masih cenderung terbatas pada koordinasi kelembagaan formal dan bersifat administratif, sementara aspek proses deliberatif, pembagian peran yang setara serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan belum berkembang secara optimal. Selain itu, sebagian besar kajian dan praktik pengembangan desa wisata masih lebih menitikberatkan pada peningkatan kunjungan dan penguatan destinasi, sehingga dimensi tata kelola kolaboratif, khususnya pada level desa, belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan realitas implementasi di lapangan, sekaligus membuka ruang penelitian terkait bagaimana *Collaborative Governance* dijalankan dalam konteks pengembangan desa wisata.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, pengembangan Desa Wisata Bantaragung tidak hanya menghadapi persoalan fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dan dominasi kunjungan institusional tetapi juga permasalahan mendasar dalam tata kelola yang belum sepenuhnya berorientasi pada keterlibatan aktor secara setara. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan desa wisata tidak semata-mata terletak pada aspek potensi pariwisata, melainkan pada bagaimana proses kolaborasi dan mekanisme tata kelola antar pemangku kepentingan dijalankan.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya meninjau pengembangan desa wisata dari sisi potensi dan capaian kunjungan, tetapi juga berupaya memahami dinamika *Collaborative Governance* pada level desa melalui kajian terhadap relasi antar aktor, mekanisme kolaborasi serta ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana proses kolaborasi terbentuk dan berlangsung dalam praktik pengelolaan desa wisata. Penelitian ini memfokuskan pada *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis. Berdasarkan fokus tersebut, Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam proses pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka?”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Identifikasi masalah dipahami dalam kerangka tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Bantaragung. Maka identifikasi masalah dalam fokus penelitian ini yaitu:

1. Belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung yang menunjukkan belum efektifnya proses kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pengelola desa wisata dan masyarakat dalam kerangka *Collaborative Governance*.
2. Mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung belum berjalan secara terstruktur dan setara sehingga berdampak pada lemahnya integrasi peran dalam tata kelola desa wisata.
3. Kelembagaan pengelolaan desa wisata belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang kolaboratif yang inklusif untuk mengakomodasi kepentingan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
4. Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung masih cenderung bersifat top - down, sehingga membatasi ruang dialog, musyawarah dan konsensus sebagai elemen penting dalam dinamika *Collaborative Governance*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, Maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam pengembangan Desa

Wisata Bantaragung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung melalui identifikasi dinamika kolaborasi antar aktor berdasarkan elemen-elemen dalam Model *Collaborative Governance*.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, Khususnya dalam kajian Manajemen Publik yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) pada tingkat desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *Collaborative Governance*, khususnya dalam memahami dinamika kolaborasi antar aktor pada pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.

##### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

###### **1. Bagi Desa Wisata Bantaragung**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta bahan refleksi bagi pemerintah desa dan lembaga pengelola dalam memahami dinamika *Collaborative Governance* pada pengembangan Desa Wisata Bantaragung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat koordinasi antar aktor, memperjelas peran masing-masing pihak, serta mendorong perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa

wisata berbasis kolaborasi.

## 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembelajaran dan pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam memahami *Collaborative Governance* pada konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam mengkaji dinamika kolaborasi antar aktor lokal dalam pembangunan desa wisata melalui perspektif *Collaborative Governance*.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti, praktisi, maupun pembuat kebijakan yang memiliki perhatian terhadap tata kelola desa dan pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi desa wisata lain dalam memahami proses pembangunan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif dan berkelanjutan..

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata telah banyak dilakukan dengan berbagai konteks wilayah dan fokus analisis. Salah satu penelitian yang membahas tema tersebut yaitu “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul Kabupaten Semarang*” (Susukan et al., 2021) Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan

*Collaborative Governance* serta faktor-faktor keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi masih menghadapi kendala pada aspek komitmen aktor, partisipasi, struktur jaringan, serta kejelasan tata kelola. Namun keberhasilan kolaborasi didukung oleh adanya kepercayaan antar aktor, regulasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, serta ketersediaan sumber daya.

Kajian serupa juga ditemukan dalam penelitian (Siok, Meyti Hardini Utami and Nooraini, n.d.) yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Loha untuk Mendukung SDGs Desa di Kabupaten Manggarai Barat*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* berlangsung melalui keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi kolektif yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs Desa, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan promosi pariwisata.

Selanjutnya, Penelitian berjudul (Poncokusumo et al., 2016) yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang*” mengkaji proses *Collaborative Governance* menggunakan model Ansell dan Gash melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi diawali melalui dialog tatap muka yang

intensif antar pemangku kepentingan. Faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi masyarakat desa.

Pembahasan *Collaborative Governance* pada konteks pariwisata daerah juga dikaji dalam penelitian (Formawati & Yuanjaya, 2023) yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Magelang*” Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan komitmen antar aktor, kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, pemetaan peran stakeholder, serta komunikasi yang efektif dalam pengelolaan pariwisata..

Penelitian lain berjudul “*Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi*” (Sudirman et al., 2022) menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berjalan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama antara aktor negara dan non-negara yang berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pendapatan lokal.

Kajian mengenai *Collaborative Governance* pada sektor pariwisata perkotaan juga ditemukan dalam penelitian “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung*” (Farhan et al., 2024) Penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* berjalan cukup

efektif dalam mendukung pencapaian program kebudayaan dan pariwisata, meskipun masih terdapat kendala berupa ego sektoral, regulasi yang kurang sesuai, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, penelitian berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Desa Ngargogondo*” (Mukti et al., 2022) menunjukkan bahwa struktur jaringan stakeholder belum terkoordinasi secara optimal dan belum memiliki kesatuan visi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga akibat pembagian peran yang tidak jelas.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Liman Kabupaten Kupang*” (Neolaka et al., 2025) Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kolaborasi belum berjalan optimal karena masih adanya dominasi pemerintah, rendahnya pengakuan terhadap masyarakat lokal, serta belum terbentuknya kelembagaan kolaboratif yang inklusif.

Selanjutnya penelitian “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis*” (Nurwanda et al., 2024) menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Collaborative Governance* karena rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor. Penelitian ini menekankan pentingnya pembangunan kepercayaan dan komitmen berkelanjutan dalam model kolaborasi ideal.

Penelitian “*The Bureaucratization of Collaborative Governance in Realizing Tourism Villages during the COVID-19 Pandemic in Winduaji Village*” (Rokhman et al., 2023) menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dapat terhambat oleh proses birokratisasi yang berlebihan sehingga memunculkan konflik horizontal dan rendahnya partisipasi masyarakat selama masa pandemi.

Berdasarkan sintesis terhadap penelitian terdahulu, kajian *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata umumnya menyoroti proses kolaborasi, keterlibatan aktor, serta faktor pendukung dan penghambat kerja sama antar pemangku kepentingan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada deskripsi praktik kolaborasi atau penilaian keberjalanannya, sehingga belum banyak yang menempatkan *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis untuk memahami secara menyeluruh dinamika hubungan antar aktor pada tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka dengan melihat bagaimana proses kolaborasi berlangsung melalui dinamika relasi aktor, mekanisme interaksi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi.

**Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Peneliti : Aninda Diah Maharani Utami dkk., Tahun : 2021	Tujuan penelitian ini Menganalisis pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> serta faktor keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kabupaten Semarang.	Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash.	Kualitatif deskriptif.	<i>Collaborative governance</i> masih menghadapi kendala pada komitmen, partisipasi, struktur jaringan, dan kejelasan tata kelola. Faktor pendukung keberhasilan meliputi kepercayaan antar aktor, regulasi, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, dan ketersediaan sumber daya
2.	Peneliti : Meyti Hardini Utami Siok, Tahun : 2024	Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui dinamika <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Loha untuk mendukung pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Manggarai Barat.	Teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash)	Kualitatif deskriptif (wawancara, observasi, dokumentasi)	<i>Collaborative governance</i> berjalan melalui keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi kolektif. Kolaborasi meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs Desa, meskipun masih terkendala infrastruktur dan promosi.
3.	Peneliti : Robeth Akbar dkk., Tahun : 2022	Mengkaji proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah, Kabupaten Malang.	Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash	Kualitatif deskriptif.	Proses kolaborasi dimulai melalui dialog tatap muka intensif. Faktor pendukung utama adalah <i>starting conditions</i> , desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif yang mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat desa.
4.	Peneliti : Mochamad Hanafi. Tahun : 2022	Tujuan Penelitian ini Untuk Mengidentifikasi proses dan faktor keberhasilan	Teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash)	Studi literatur dengan analisis konten.	Hasil penelitian menunjukkan Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kepercayaan,

		<i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang			komitmen, kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, pemetaan peran stakeholder, serta komunikasi antar aktor dalam pengelolaan pariwisata
5.	Peneliti : Faturachman Alputra Sudirman dkk., Tahun : 2022	Tujuan penelitian ini yaitu Mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif dalam pembangunan pariwisata Bajo Mola Wakatobi	Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2008)	Kualitatif (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi).	Hasil penelitian menunjukkan Proses kolaborasi berjalan baik melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama antar aktor negara dan non-negara. Dampaknya terlihat pada peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sampah, serta peningkatan pendapatan warga Bajo Mola.
6.	Peneliti : Muhammad Farhan Akbar Maulana dkk., Tahun : 2023	Tujuan Penelitian ini Menganalisis efektivitas penerapan <i>Collaborative Governance</i> di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam pengelolaan sektor kebudayaan dan pariwisata..	Teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell & Gash (2008).	Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan <i>Collaborative governance</i> berjalan efektif dan mendukung pencapaian program. Namun masih terdapat kendala berupa ego sektoral, regulasi yang kurang sesuai, dan keterbatasan kualitas SDM.
7.	Peneliti : Fadlurrahman dkk., Tahun : 2022	Tujuan Penelitian ini untuk Menganalisis proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur.	Teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell & Gash (2007).	Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur jaringan stakeholder belum terkoordinasi dengan baik dan belum memiliki kesatuan visi. Terdapat potensi konflik antar lembaga lokal akibat pembagian peran yang tidak jelas.

8.	Peneliti : Melkisedek N. B. C. Neolaka dkk., Tahun : 2025	Tujuan Penelitian ini untuk Menganalisis praktik <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Pantai Liman, Kabupaten Kupang.	Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2008) dan konsep Sustainable Tourism UNWTO (2018).	Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik kolaborasi belum berjalan optimal karena dominasi pemerintah, rendahnya pengakuan terhadap masyarakat lokal dan belum terbentuknya kelembagaan kolaboratif yang inklusif.
9.	Peneliti : Asep Nurwanda dkk., Tahun : 2024	Tujuan Penelitian ini Adalah Menganalisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata serta merumuskan model kolaborasi ideal di Kabupaten Ciamis.	Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash.	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan Pengembangan desa wisata belum sepenuhnya menerapkan <i>Collaborative Governance</i> karena rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor. Model ideal menekankan pembangunan kepercayaan dan komitmen berkelanjutan.
10.	Peneliti : Tobirin dkk. Tahun : 2023	Tujuan penelitian ini yaitu Menganalisis proses <i>Collaborative Governance</i> , hambatan, dan solusi dalam pengembangan desa wisata selama pandemi COVID-19 di Desa Winduaji.	Konsep <i>Collaborative Governance</i> dan teori birokratisasi dalam tata kelola publik.	Kualitatif Deskriptif.	<i>Collaborative governance</i> cenderung terjebak dalam birokratisasi sehingga menghambat pengembangan desa wisata. Konflik horizontal dan rendahnya kesadaran penerapan protokol kesehatan menjadi kendala utama.

*Data Diolah Peneliti, 2026.*

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Administrasi Publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya serta aparatur negara untuk menyusun, menjalankan dan mengelola kebijakan publik. Sebagai sebuah bidang keilmuan, Administrasi Publik menggabungkan unsur seni dan ilmu dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui upaya perbaikan di aspek organisasi, manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan negara. (Prof. Dr. Yeremias T. Keban, S.U., 2019).

Administrasi Publik mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tujuan utamanya adalah membangun praktik pengelolaan yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam (Yusri, 2020)), Administrasi Publik memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya:

1. Administrasi Publik merupakan bentuk kerja sama kolektif yang berlangsung dalam lingkup pemerintahan.
2. Cakupan Administrasi Publik meliputi ketiga cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta relasi yang terbentuk di antara ketiganya.
3. Administrasi Publik berperan penting dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, sehingga tidak dapat dipisahkan dari dinamika

politik.

4. Administrasi Publik juga menjalin hubungan erat dengan sektor swasta dan individu dalam upaya memberikan pelayanan publik secara optimal.
5. Dalam beberapa aspek, Pengertian Administrasi Publik berbeda dengan administrasi yang bersifat personal atau individu, terutama dalam hal cakupan dan tujuannya.

Administrasi publik adalah bidang keilmuan sekaligus praktik yang berfokus pada pengelolaan berbagai kegiatan pemerintahan dan lembaga sektor publik. Cakupannya meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan dan layanan publik. Tujuan utama dari administrasi publik adalah menciptakan tata kelola yang efisien, efektif dan transparan dalam pemanfaatan sumber daya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik juga mencakup dimensi hukum, nilai-nilai etika serta persoalan-persoalan kebijakan yang sering kali bersifat kompleks dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini berada dalam ranah Administrasi Publik karena memfokuskan pada bagaimana aktor-aktor publik dan komunitas lokal terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Kajian ini relevan dengan dimensi manajemen publik, tata kelola kelembagaan lokal serta interaksi antar pemangku kepentingan dalam membangun sinergi untuk tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Paradigma Administrasi berfokus pada letak Kebijakan publik dan Manajemen Publik, Penelitian ini berada pada Manajemen Publik.

### 1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen Publik bukan bentuk dari manajemen ilmiah (*scientific management*), Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ia banyak dipengaruhi oleh pendekatan tersebut. Manajemen publik juga bukan sekadar analisis kebijakan maupun identik dengan administrasi publik. Sebaliknya, Manajemen Publik mencerminkan adanya ketegangan antara dua pendekatan besar yaitu orientasi rasional-instrumental di satu sisi, dan orientasi politik kebijakan di sisi lain. Dalam esensinya, manajemen publik merupakan studi interdisipliner yang menelaah aspek-aspek umum dalam organisasi, dan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dengan elemen-elemen sumber daya seperti manusia, keuangan, fisik, informasi serta unsur politik (Yeremias T. Keban., 2004).

Sementara, (Pasolong, 2008) menyederhanakan makna manajemen publik sebagai “manajemen instansi pemerintah.” Meskipun definisi ini bersifat umum, namun intinya menekankan pada bagaimana suatu lembaga pemerintahan dikelola secara efektif. Pandangan ini menggambarkan bahwa manajemen publik berhubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan pemerintahan yang kompleks. Tidak hanya menyentuh kebijakan publik, politik dan keuangan tetapi juga menjangkau ranah-ranah lain yang saling terkait. Manajemen publik memiliki pengaruh besar terhadap praktik administrasi publik, yang menjadi sektor utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Berbagai kecenderungan tersebut dapat dipahami dari sisi historis, karena akar keilmuan manajemen publik banyak terinspirasi oleh pemikiran Woodrow

Wilson sekitar tahun 1887. Dalam kerangka tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam (Pasolong, 2008), Wilson mengemukakan empat prinsip dasar administrasi publik yang turut membentuk arah perkembangan manajemen publik, yakni:

- A. Pemerintah sebagai konteks utama dalam organisasi;
- B. Fungsi eksekutif sebagai titik fokus utama;
- C. Pentingnya pencarian prinsip dan teknik manajerial yang efektif sebagai landasan penguatan kompetensi administratif;
- D. Penggunaan metode perbandingan sebagai pendekatan dalam studi administrasi publik.

Sedangkan manajemen publik sebagai ilmu (*Science*), manajemen publik memerlukan analisis yang sistematis dengan interpretasi dan eksplanasi. Sedangkan manajemen publik sebagai profesi (*profession*), manajemen publik dikendalikan oleh orang yang berdedikasi pada ilmu ini.

Fungsi dari manajemen sendiri menurut Donovan dan Jackson dalam (Yeremias T. Keban., 2014) antara lain meliputi *fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Staffing, Leading dan Controlling* Manajemen Publik merupakan suatu spesialisasi baru namun lahir dari pendekatan normatif. Woodrow Wilson menulis buku '*The Study of Administration*' pada tahun 1887. Dalam tulisannya manajemen publik benar-benar dibicarakan. Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik berorientasi pada dunia bisnis, perbaiki kualitas personel dalam pemerintahan, aspek organisasi serta metode pemerintahan.

Dalam ilmu administrasi publik, Perhatian utama tertuju pada dua aspek penting yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Fokus kajian ini terletak

pada ranah manajemen publik yang mengalami evolusi pemikiran melalui berbagai pendekatan teoritis yang disebut sebagai paradigma. Perkembangan paradigma dalam manajemen publik tidak hanya mencerminkan perubahan dalam praktik administrasi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara merespons dinamika masyarakat serta tuntutan efisiensi dan partisipasi publik. Adapun empat paradigma utama yang membentuk dasar pemikiran dalam manajemen publik (Mustanir et al., 2022) yaitu :

1) *Old Public Administration* (OPA)

*Old Public Administration* merupakan paradigma awal dalam manajemen publik yang didasarkan pada model birokrasi tradisional. Pendekatan ini memandang administrasi publik sebagai sistem hierarkis yang berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, sentralisasi kekuasaan dan pemisahan antara ranah politik dan administratif. Pemerintah dalam paradigma ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan secara teknokratis, tanpa melibatkan banyak partisipasi publik. Model ini kuat dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber dan Woodrow Wilson.

2) *New Public Management* (NPM)

Paradigma *New Public Management* muncul pada akhir abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kelemahan birokrasi konvensional. *New Public Management* mengusung nilai-nilai manajerial ala sektor swasta ke dalam sektor publik, dengan menekankan efisiensi, efektivitas dan pengukuran kinerja. Pemerintah dalam pendekatan ini dipandang sebagai penyedia layanan yang harus bersaing secara profesional, sementara masyarakat diposisikan sebagai pelanggan. *New Public Management* juga mendukung praktik privatisasi, kontraktualisasi layanan dan

desentralisasi kewenangan.

### 3) *New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* lahir sebagai kritik terhadap pendekatan *New Public Management* yang dianggap terlalu menekankan logika pasar dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi. *New Public Service* memandang masyarakat bukan sebagai konsumen, melainkan sebagai warga negara aktif yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah dalam kerangka ini bertindak sebagai fasilitator dan kolaborator yang mendorong partisipasi, membangun dialog dan berorientasi pada pelayanan yang berkeadilan.

### 4) *Governance*

Paradigma tata kelola muncul sebagai respon atas kebutuhan akan pemerintahan yang inklusif, akuntabel dan partisipatif. *Governance* menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor negara, swasta dan masyarakat sipil dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Ciri utama dari pendekatan ini adalah pengakuan terhadap kompleksitas persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan melalui kemitraan lintas sektor, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan publik yang aktif.

#### **1.6.4 *Governance***

*Governance* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi dalam penyelenggaraan urusan publik yang tidak lagi sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah, melainkan melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai aktor di luar struktur negara termasuk sektor swasta dan elemen masyarakat sipil. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model pemerintahan yang terpusat

menuju tata kelola kolaboratif yang menekankan sinergi antar aktor lintas sektor (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020).

Perubahan dari *government* menuju *governance* ditandai dengan penekanan pada nilai-nilai dialogis dan kolaboratif, yang menghasilkan bentuk pengelolaan publik yang lebih adaptif, inklusif dan responsif. Atas dasar perubahan ini, Berkembang konsep *governance* yang baik (*good governance*), yaitu praktik pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, keadilan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan.

Kajian mengenai *governance* pada umumnya menyoroti tiga aspek utama yang menjadi pembeda mendasar dibandingkan dengan pendekatan administrasi publik yang bersifat tradisional yang terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Dimensi Kelembagaan

Dimensi Kelembagaan menyoroti pentingnya struktur partisipatif yang melibatkan berbagai pihak (*multi-actors*) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan publik. Dimensi Kelembagaan dipahami sebagai sebuah sistem administrasi yang melibatkan berbagai aktor, baik dari lingkup pemerintahan maupun non-pemerintahan. Fokus perhatian pada isu kelembagaan ini sering kali berkaitan dengan upaya pemetaan serta identifikasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan turut terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Dalam berbagai literatur, kajian mengenai pemangku kepentingan telah banyak dikaji dari perspektif lintas disiplin, termasuk dalam ranah ilmu

kebijakan publik. Meskipun awalnya dikembangkan dalam konteks ilmu manajemen dan administrasi bisnis, pendekatan terhadap *stakeholder* ini kemudian meluas hingga ke berbagai disiplin lain, seperti ilmu politik, studi pembangunan hingga studi lingkungan.

b. Dimensi Nilai

Dimensi Nilai merupakan fondasi utama dalam praktik penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai yang digunakan dalam suatu konteks pemerintahan tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah serta pengalaman sosiokultural dari masing-masing negara. Dalam implementasinya, nilai-nilai lokal yang mencerminkan kearifan masyarakat setempat kerap terpinggirkan ketika birokrasi rasional-legal ala Weber mulai diterapkan secara sistematis dan dilembagakan (Agus Dwiyanto, 2018).

Dalam perspektif lain, Nilai dapat dipahami sebagai seperangkat keyakinan atau prinsip moral yang telah mengakar secara personal maupun kolektif dalam diri individu atau komunitas tertentu. Keyakinan ini biasanya terbentuk melalui proses sosialisasi dalam lingkungan sosial seperti keluarga, institusi keagamaan, kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki tujuan bersama.

Secara konseptual, Nilai dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif merujuk pada keyakinan mendalam yang diyakini seseorang sebagai hasil dari proses internalisasi jangka panjang bukan sekadar pengetahuan yang diberikan secara satu arah. Sementara itu nilai prosedural adalah jenis nilai yang dapat dikembangkan melalui

pembelajaran dan latihan, seperti nilai kebebasan, kejujuran, toleransi, sikap menghargai perbedaan dan penghormatan terhadap kebenaran maupun individu lain. Nilai-nilai ini penting dalam menopang kehidupan masyarakat yang demokratis, karena mendorong terwujudnya partisipasi aktif, dialog terbuka, serta kerja sama dalam keragaman. Salah satu fokus studi mengenai nilai dalam masyarakat adalah pada konsep kearifan lokal (*local wisdom*) dan modal sosial (*social capital*), yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari interaksi sosial masyarakat dan menjadi perekat solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

#### c. Dimensi Proses

Dimensi Proses berfokus pada bagaimana berbagai aktor dan institusi merespons tantangan serta persoalan publik yang muncul dalam konteks sosialnya masing-masing. Dimensi ini menekankan pentingnya memahami tahapan atau rangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam menangani isu-isu kebijakan. Proses sendiri dapat dipahami sebagai alur kerja yang terstruktur, di mana serangkaian kegiatan dijalankan secara berurutan guna mengubah input menjadi output yang diharapkan. Dalam pengertian lain, proses menggambarkan langkah-langkah sistematis yang dapat dilalui secara berulang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahapan dalam proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar konsisten mengarah pada pencapaian hasil yang efektif dan sesuai sasaran (Agus Dwiyanto, 2018).

Penelitian ini ditempatkan dalam dimensi kelembagaan, karena berfokus pada bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan meliputi

pemerintah desa, Lembaga pengelola dan masyarakat dijalankan dalam kerangka *Collaborative Governance* pada pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami pola relasi antar aktor, mekanisme kolaborasi serta peran kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana dirumuskan dalam pertanyaan penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata.

### **1.6.5 Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* merupakan salah satu dimensi dari *governance*. *Collaborative Governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan *non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif dan berorientasi pada konsensus, yang ditujukan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam *Collaborative Governance*, setiap pemangku kepentingan tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi diwajibkan untuk terlibat secara aktif dalam dialog yang terbuka dan *deliberatif*. Dialog ini menjadi ruang bagi para aktor untuk secara langsung menyuarakan kepentingan mereka sendiri, membangun pemahaman bersama, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif menuntut keterlibatan yang sejati dan representatif dari seluruh pihak yang terdampak, demi menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang inklusif, transparan dan berkelanjutan (David E. Booher, 2002).

Fokus utama dari *Collaborative Governance* terletak pada penanganan kebijakan dan persoalan publik. Lembaga-lembaga publik memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan, namun proses kolaborasi yang dibangun bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Tata kelola kolaboratif diarahkan untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial melalui upaya memenuhi kepentingan publik secara adil dan partisipatif, dengan memastikan bahwa setiap pihak memiliki ruang yang setara dalam menyuarakan aspirasinya serta turut menentukan keputusan akhir secara kolektif.

*Collaborative Governance* muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak lagi dapat diselesaikan secara hierarkis dan sektoral. Karakter dari *Collaborative Governance* menurut (Mark T.Imperial, 2005) antara lain :

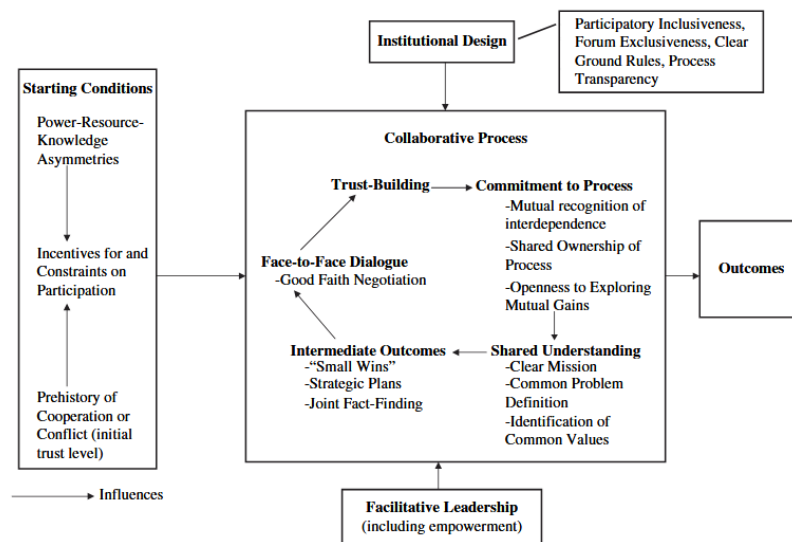
- a) Inisiatif dari lembaga publik, Proses kolaboratif dimulai atau difasilitasi oleh badan atau institusi pemerintahan.
- b) Keterlibatan aktor non-pemerintah, Forum mencakup partisipasi dari pihak-pihak di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta atau komunitas lokal. Orientasi pada pencapaian hasil bersama yang tidak dapat diwujudkan secara sepihak.
- c) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, Pemangku kepentingan non-negara tidak hanya dimintai pendapat tetapi turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

- d) Struktur forum yang formal, Interaksi terjadi dalam wadah yang disusun secara terorganisir dan terjadwal, bukan sekadar komunikasi informal.
- e) Orientasi konsensus, Tujuan forum adalah mencapai kesepakatan bersama, meskipun dalam praktiknya konsensus penuh tidak selalu tercapai.
- f) Fokus pada isu publik, Proses kolaboratif diarahkan pada penyusunan atau pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan program atau aset yang bersifat publik.

Dalam *Collaborative Governance* terdapat beberapa model yang dikembangkan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dapat terjadi dan dikelola secara efektif. Model *Collaborative Governance* terbagi menjadi 3 yaitu :

- (1) Model *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008).

**Gambar 1.1 Model *Collaborative Governance***



Sumber : (Ansell & Gash, 2008).

Model ini mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai forum pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor

non-pemerintah melalui proses deliberatif dan konsensus, Terdapat 4 Variabel utama yaitu :

a) Kondisi Awal (*Starting Conditions*).

Kondisi Awal mencerminkan latar belakang sosial-politik sebelum kolaborasi dimulai. Tiga aspek utama yang menjadi perhatian yaitu ketimpangan kekuasaan, sumber daya dan informasi antar pemangku kepentingan; sejarah konflik atau kerja sama sebelumnya; serta adanya insentif atau hambatan untuk terlibat dalam proses kolaboratif. Kondisi-kondisi ini berfungsi sebagai titik awal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dasar antar aktor. Jika para pihak memiliki sejarah konflik yang panjang atau tidak percaya satu sama lain, maka akan diperlukan usaha yang lebih besar untuk membangun kolaborasi yang efektif. Sebaliknya, jika ada pengalaman kerja sama sebelumnya yang positif, proses dialog dan pengambilan keputusan cenderung lebih mudah terbentuk

b) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*).

Desain Kelembagaan berkaitan dengan struktur formal, aturan dasar, serta mekanisme yang mengatur jalannya proses kolaboratif. Desain ini mencakup prinsip inklusivitas partisipatif, kejelasan forum, aturan main yang transparan dan keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah menciptakan rasa keadilan prosedural, di mana semua pemangku kepentingan merasa bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat serta memengaruhi hasil akhir. Desain kelembagaan yang tidak inklusif atau tidak transparan berpotensi menciptakan ketidakpercayaan, manipulasi proses, bahkan kegagalan kolaborasi sejak awal.

c) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*).

Kepemimpinan Fasilitatif memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga iklim kolaboratif yang sehat. Pemimpin dalam konteks ini tidak harus bersifat otoritatif, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak secara aktif, menjembatani perbedaan pandangan, dan menciptakan suasana dialog yang konstruktif. Kepemimpinan yang baik juga mampu memberdayakan kelompok-kelompok yang lemah agar dapat berpartisipasi secara bermakna. Dalam kondisi di mana ketimpangan kekuasaan tinggi atau kepercayaan antar pihak rendah, pemimpin yang netral dan dapat dipercaya menjadi kunci bagi terciptanya proses kolaboratif yang berhasil.

d) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*).

Proses Kolaboratif terdiri atas beberapa tahapan penting yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses dan pencapaian pemahaman bersama. Dialog langsung dianggap sebagai fondasi utama, karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang terbuka. Dari proses ini, kepercayaan mulai terbentuk yang kemudian mendorong munculnya komitmen untuk terus terlibat dalam kolaborasi. Selain itu, proses ini juga menghasilkan pemahaman bersama mengenai tujuan, permasalahan yang dihadapi, dan nilai-nilai yang diyakini bersama oleh semua pihak. Jika proses ini berhasil dijalankan, maka akan muncul hasil antara berupa “kemenangan kecil” seperti kesepakatan awal atau pencapaian bersama yang semakin memperkuat hubungan kerja sama antar aktor.

Model ini bersifat prosesual dan menekankan pentingnya dinamika interaksi antar aktor dalam membangun kepercayaan dan efektivitas kolaborasi.

### **1.6.6 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata adalah sebuah proses strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan upaya untuk meningkatkan potensi suatu destinasi agar dapat menarik lebih banyak wisatawan serta memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata tidak sekadar berorientasi pada peningkatan jumlah pengunjung, melainkan juga pada peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat lokal serta pelestarian nilai-nilai yang melekat di destinasi tersebut (Setiawan et al., 2023).

(Clare A. Gunn, 2002) menekankan pentingnya aspek tata ruang, transportasi, serta atraksi wisata dalam mendorong pertumbuhan pariwisata yang terintegrasi. Prinsip utama dalam pengembangan pariwisata meliputi keberlanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan, serta penguatan identitas budaya. Pariwisata yang berkualitas yakni bentuk pariwisata yang memprioritaskan nilai tinggi dalam layanan dan pengalaman harus dilandasi oleh etika, transparansi, serta penghargaan terhadap manusia dan alam.

Prinsip keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam pengembangan destinasi. Hal ini termasuk dalam bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepemilikan usaha pariwisata, dan distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, Pengembangan pariwisata dapat menjadi alat untuk

mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. (Janita Dewi et al., 2022).

Pengembangan pariwisata dalam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan *Sustainable Tourism Development* mengintegrasikan tiga dimensi utama (UNWTO, 2015) yaitu Keberlanjutan ekonomi (*economic viability*), Tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*) dan Kesejahteraan komunitas (*community well-being*).

Pengembangan Pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga sebagai proses peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal serta pelestarian identitas dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki. (David Weaver & Laura Lawton, 2010) menyatakan bahwa pengembangan destinasi wisata yang efektif terdiri dari tiga elemen utama yaitu

- a. Atraksi wisata seperti keunikan budaya, keindahan alam, dan nilai sejarah;
- b. Fasilitas dan infrastruktur penunjang, meliputi aksesibilitas, akomodasi, dan sistem informasi;
- c. Kelembagaan yaitu aktor-aktor seperti pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal yang mengatur dan mendistribusikan manfaat pariwisata secara adil.

Ketiga elemen tersebut harus dikembangkan secara simultan agar tercipta ekosistem pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Keseimbangan antara sisi penawaran (*supply-side*) dan permintaan (*demand-side*) menjadi kunci keberhasilan pembangunan destinasi.

### **1.6.7 Desa Wisata**

Desa wisata dipahami sebagai model pengembangan pariwisata berbasis pedesaan yang mengintegrasikan potensi alam, budaya dan kehidupan sosial masyarakat dalam satu kesatuan destinasi yang dikelola secara partisipatif. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pariwisata massal serta sebagai strategi pembangunan alternatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pengelolaan pariwisata. Desa wisata tidak hanya berorientasi pada penciptaan atraksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat serta keberlanjutan sumber daya lokal.

Keunikan desa wisata terletak pada penyajian pengalaman autentik melalui keterlibatan wisatawan dalam aktivitas keseharian warga, seperti tradisi budaya, sistem pertanian, kerajinan lokal dan pola hidup masyarakat desa. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, Desa wisata juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya dan konservasi lingkungan, sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan ekologis (Prakoso, 2022).

Dalam implementasinya desa wisata dituntut mampu mengoptimalkan potensi internal desa melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola destinasi yang terorganisasi serta strategi promosi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar wisatawan (Kartika & Muchtar, 2023).

(Reza & Murdana, 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan desa wisata idealnya didasarkan pada pendekatan produk pariwisata 5A yaitu :

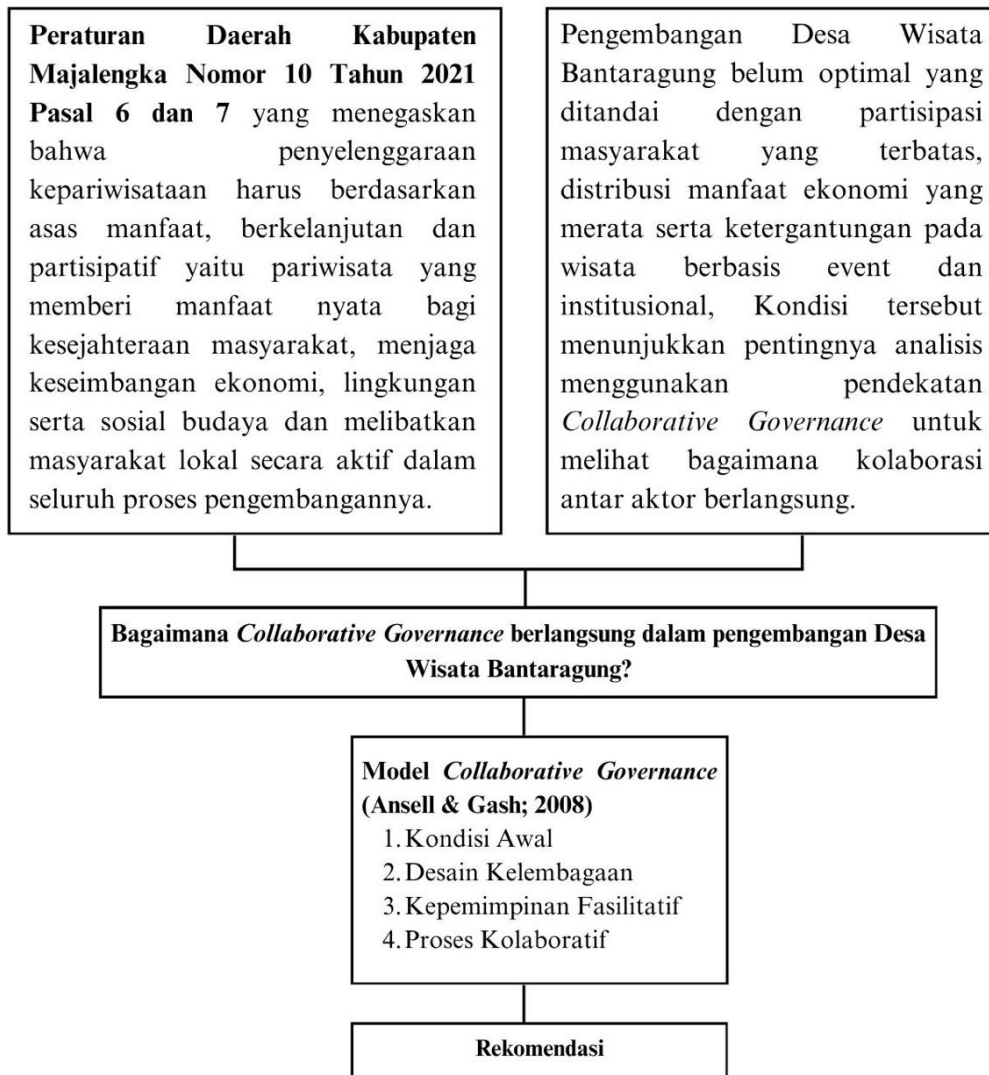
1. Atraksi yang dapat berupa kekayaan alam maupun ekspresi budaya lokal.
2. Aksesibilitas yang berkaitan dengan kemudahan menjangkau lokasi desa wisata.
3. Amenitas yang mencakup fasilitas penunjang seperti toilet, musala dan area parkir.
4. Akomodasi yang umumnya dikembangkan melalui konsep homestay berbasis rumah warga.
5. Aktivitas dalam wisata dirancang agar wisatawan dapat terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, seperti kegiatan kuliner tradisional, bersepeda keliling desa, hingga partisipasi dalam aktivitas budaya.

Kelima komponen tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun daya tarik destinasi sekaligus menentukan kualitas pengalaman wisatawan. Optimalisasi setiap aspek tersebut berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan desa wisata dan memperkuat posisi desa sebagai destinasi alternatif yang berdaya saing. Selain aspek fisik dan produk wisata, keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan.

(Kartika & Muchtar, 2023) menekankan pentingnya pemetaan potensi desa, penguatan promosi berbasis digital, koordinasi lintas sektor serta pelatihan sumber daya manusia sebagai strategi utama pengembangan desa wisata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa desa wisata tidak dapat berkembang secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, kelompok sadar wisata, pelaku usaha lokal dan masyarakat. Desa wisata bukan sekadar destinasi, tetapi menjadi ruang

pemberdayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kohesi sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan secara terpadu.

## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1. 2 Kerangka Pikir Penelitian Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka**

*Data Diolah Peneliti, 2026.*

## 1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini disusun untuk menjabarkan secara sistematis rumusan masalah penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. *Collaborative Governance* digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana dinamika hubungan antar aktor, mekanisme kolaborasi, serta proses pengambilan keputusan berlangsung dalam pengelolaan desa wisata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji interaksi antara pemerintah desa, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam membangun tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui operasionalisasi konsep ini, *Collaborative Governance* dipahami sebagai perspektif analitis untuk melihat keterlibatan aktor lintas sektor, proses dialog dan koordinasi, pembagian peran antar pihak, serta komitmen bersama dalam pengembangan desa wisata. Dalam kerangka tersebut, *Collaborative Governance* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kerja sama administratif, tetapi sebagai proses tata kelola kolaboratif yang menunjukkan bagaimana hubungan antar aktor terbentuk dan dijalankan dalam praktik pengelolaan desa wisata. Kerangka ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dinamika dan karakteristik kolaborasi serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerja sama dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

**Tabel 1. 7 Operasional *Collaborative Governance***

<b>Aspek</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Sub-Fenomena</b>
Kondisi Awal	Hubungan awal antar aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung.	a) Riwayat kerja sama antara Pokdarwis, BUMDes, Pemerintah Desa, dan Dinas Pariwisata. b) Ketimpangan peran dan kapasitas antar aktor.
Desain Kelembagaan	Struktur koordinasi dan mekanisme komunikasi dalam pengelolaan desa wisata.	a) Ketersediaan forum koordinasi antar lembaga. b) Kejelasan pembagian wewenang, struktur peran, dan SOP pengelolaan wisata.
Kepemimpinan Fasilitatif	Peran aktor penggerak dalam mendorong keterlibatan masyarakat.	a) Peran Pokdarwis sebagai penggerak masyarakat. b) Pengaruh kepemimpinan lokal dalam menjaga partisipasi masyarakat.
Proses Kolaboratif	Interaksi antar aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan wisata.	a) Pola dialog dan musyawarah antar aktor. b) Tingkat kepercayaan dan komitmen kolektif dalam pengelolaan desa wisata.

*Data Diolah Peneliti, 2026.*

### **1.9 Argumen Penelitian**

Pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata berkelanjutan menuntut tata kelola yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat secara setara serta terkoordinasi. Dalam hal ini, pendekatan *Collaborative Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash menjadi relevan karena menekankan pentingnya interaksi antar aktor melalui Kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan fasilitatif, serta Proses kolaboratif dalam membangun pengambilan keputusan bersama yang

partisipatif dan deliberatif. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan kebijakan publik dipahami sebagai proses bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kolektif.

Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka memiliki potensi alam, budaya, serta inovasi digital yang mendukung pengembangan pariwisata desa. Namun demikian, dinamika pengembangannya masih ditandai oleh fluktuasi kunjungan wisatawan serta ketergantungan pada event dan paket wisata institusional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata belum sepenuhnya ditopang oleh sistem tata kelola kolaboratif yang stabil dan berorientasi jangka panjang. Meskipun kelembagaan formal seperti Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan BUMDes telah terbentuk, Praktik kolaborasi yang berlangsung masih cenderung bersifat administratif. Keterlibatan masyarakat lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan kegiatan, sementara ruang perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh aktor formal.

Dinamika tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung tidak hanya terletak pada aspek pengelolaan destinasi, tetapi pada bagaimana hubungan kolaboratif antar aktor terbentuk dan dijalankan. Permasalahan pengembangan desa wisata dalam konteks ini berkaitan dengan bagaimana relasi antar aktor dibangun, bagaimana desain kelembagaan berfungsi dalam mengatur interaksi, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat berlangsung dalam praktik pengelolaan desa wisata. Pengembangan desa wisata dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks kebijakan, sementara fokus analisis diarahkan pada

dinamika *Collaborative Governance* yang mencakup Kondisi awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan fasilitatif, serta Proses kolaboratif.

Dengan kerangka tersebut, Penelitian ini tidak berfokus pada aspek teknis pengembangan destinasi wisata, melainkan berupaya memahami bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam tata kelola pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka melalui dinamika interaksi dan keterlibatan antar aktor yang terlibat di dalamnya.

### **1.10 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memahami dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam proses kolaborasi antar aktor, pola interaksi serta mekanisme kerja sama yang terbentuk dalam pengembangan desa wisata dengan menggunakan *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis penelitian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam konteks alami, memahami perspektif para pelaku secara langsung, dan menangkap hubungan-hubungan sosial yang membentuk fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, fokus utama penelitian bukan sekadar pada hasil akhir (*outcome*), melainkan pada proses kolaboratif yang terjadi dalam membentuk tata kelola wisata berbasis komunitas secara partisipatif dan berkelanjutan (Sugiyono, 2023).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sementara proses analisis dilakukan secara induktif dan terbuka terhadap dinamika

temuan di lapangan, sehingga mampu menangkap kompleksitas realitas sosial sebagaimana adanya (Rahmadi, S.Ag., 2011).

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses kolaborasi, pola hubungan antar aktor, serta dinamika tata kelola yang berlangsung secara alami dalam konteks pengelolaan desa wisata.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap realitas sosial berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah desa, lembaga pengelola, dan masyarakat lokal. *Collaborative Governance* dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana proses kolaborasi antar aktor berlangsung serta bagaimana interaksi dan keterlibatan para pihak terbentuk dalam praktik pengembangan desa wisata di lapangan.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Wisata Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Desa Bantaragung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini telah menunjukkan perkembangan signifikan sebagai destinasi wisata. Meski mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan secara signifikan (dari 472.906

orang pada 2021 menjadi 1.050.505 orang pada 2023 menurut data BPS Provinsi Jawa Barat), Pengembangan pariwisata di Desa Bantaragung masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal dalam tata kelola destinasi wisata.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini merupakan individu maupun kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada tingkat keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman para aktor dalam aktivitas pengembangan desa wisata, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan terkait dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa.

Subjek penelitian berperan sebagai informan kunci yang memahami hubungan antar aktor, mekanisme kerja sama, serta proses interaksi yang berlangsung dalam pengelolaan desa wisata sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Melalui perspektif para informan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman mengenai bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam praktik pengembangan Desa Wisata Bantaragung, khususnya dalam membangun koordinasi, partisipasi dan pengambilan keputusan bersama antar aktor yang terlibat.

Pemilihan subjek penelitian diarahkan untuk mendukung analisis *Collaborative Governance* sebagai kerangka dalam memahami dinamika kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten

Majalengka. Berikut informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 8 Subjek Penelitian**

No	Informan
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka
2.	Kepala Desa Bantaragung
3.	Ketua BUMDes Desa Bantaragung
4.	Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Bantaragung
5.	Ketua Karang Taruna Desa Bantaragung
6.	Masyarakat dan Pelaku Usaha Desa Bantaragung

*Data Diolah Peneliti, 2026.*

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan kunci berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan aktif dalam pengelolaan pariwisata, pengetahuan terhadap potensi lokal, serta kapasitas dalam kelembagaan desa (Sugiyono, 2023).

#### **1.10.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif, berupa narasi serta dokumen yang berkaitan dengan dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Data kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses kolaborasi, hubungan antar aktor, serta pemaknaan para pemangku kepentingan terhadap praktik pengelolaan desa wisata yang berlangsung di lapangan.

Data kualitatif pada umumnya bersumber dari kata-kata lisan dan tulisan, tindakan sosial, serta berbagai dokumen yang memiliki makna substantif. Dalam

penelitian ini, data dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam proses pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

#### **1.10.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam terhadap aktivitas pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Informan penelitian meliputi pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku usaha lokal, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata desa. Data primer digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan para informan mengenai dinamika kolaborasi antar aktor, pola interaksi yang terbentuk, serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata.

Melalui data tersebut, penelitian berupaya memahami bagaimana *Collaborative Governance* berlangsung dalam praktik pengelolaan Desa Wisata Bantaragung dengan melihat relasi antar aktor, mekanisme koordinasi, serta proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam pengembangan desa wisata. Data primer juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kolaborasi serta tantangan yang dihadapi para aktor dalam membangun kerja sama pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen tertulis dan arsip yang relevan, seperti Peraturan Bupati, Surat Keputusan Desa Wisata, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Bantaragung dan tata kelola pariwisata di tingkat desa. Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan data primer, sekaligus memberikan konteks kebijakan, historis, dan administratif terhadap pengembangan desa wisata. Data sekunder juga berfungsi membantu memahami latar belakang kelembagaan, peran aktor, serta dinamika kolaborasi yang menjadi konteks dalam analisis *Collaborative Governance* pada penelitian ini.

### 1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data maka teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Pemilihan teknik wawancara bertujuan untuk menggali secara langsung pandangan, pengalaman, serta pemahaman para pemangku kepentingan mengenai dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata. Fokus penggalan data diarahkan pada proses kolaborasi antar aktor, peran masing-masing pihak, mekanisme pengambilan keputusan, serta berbagai tantangan yang muncul dalam praktik pengelolaan Desa Wisata Bantaragung.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan berdasarkan fokus penelitian dan elemen-elemen dalam model *Collaborative Governance*, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang mereka. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya data yang bersifat kualitatif dan naratif sehingga mampu menangkap persepsi, pemaknaan, serta pengalaman informan terhadap proses kolaborasi yang berlangsung di tingkat desa. Melalui teknik ini, Penelitian berupaya memahami dinamika hubungan antar aktor dan proses kolaborasi secara lebih mendalam berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

#### **1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Proses analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena penelitian secara bertahap dan kontekstual. Melalui proses tersebut *Collaborative Governance* digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca dinamika kolaborasi antar aktor yang terjadi dalam pengembangan desa wisata.

#### A. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil wawancara ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan dinamika kolaborasi antar aktor, peran masing-masing pihak, mekanisme pengambilan keputusan, serta interaksi yang terjadi dalam pengembangan desa wisata. Proses reduksi data bertujuan menata informasi agar lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan dan proses kolaborasi yang muncul dari temuan lapangan.

#### B. Penyajian Data

Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian sehingga hubungan antar kategori dapat dipahami secara runtut. Melalui penyajian ini, data hasil wawancara disusun menjadi narasi yang menggambarkan dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

#### C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan data wawancara berdasarkan kerangka *Collaborative Governance* yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, temuan empiris dihubungkan dengan elemen-elemen dalam model *Collaborative Governance* guna memahami bagaimana proses kolaborasi berlangsung serta bagaimana keterlibatan

aktor terbentuk dalam pengembangan desa wisata. Proses ini bertujuan menghasilkan interpretasi yang kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

#### D. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi, disajikan, dan diolah. Kesimpulan disusun untuk menggambarkan dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka serta menjelaskan keterkaitan antar elemen kolaborasi yang ditemukan dalam proses pengelolaan desa wisata berdasarkan temuan penelitian.

#### 1.10.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang diteliti, mengurangi subjektivitas peneliti, serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Menurut (Sugiyono, 2023) Triangulasi sumber merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki latar belakang peran dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai realitas sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, pemerintah Desa Bantaragung, pengelola BUMDes, Pokdarwis, Karang Taruna, serta masyarakat dan pelaku usaha lokal. Proses perbandingan data tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi terkait dinamika proses kolaborasi, pembagian peran antar aktor, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam *Collaborative Governance* pada pengelolaan Desa Wisata Bantaragung, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi empiris penelitian secara lebih kredibel dan kontekstual.